

# **PENGARUH DEWAN KOMISARIS TERHADAP ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI TAHUN 2008- 2011**

---

**Bahtiar Effendi**

**Lia Uzliawati**

**Agus Sholikhhan Yulianto**

(FE Universitas Sultan Ageng Tirtayasa- Serang)

## **Abstract**

*The Aims of this research at examining the influence of board of commissioners, such as board of commissioners size, proportion of independent commissioners, the commissioner president's educational background, and the number of commissary chamber meeting on the environmental disclosure in manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange. This study also investigates size, leverage and profitability as control variable.*

*The population of this research is all of public manufacture companies in the year 2008-2011 The samples of this research are 26 of public manufacture companies, which selected by purposive sampling method. This research data were collected from Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2008 until 2011 and also from each company's website.*

*By using multiple regression analysis as the research method and the result from this research show that is no influence between commissioners size, proportion of independent commissioners, the commissioner president's educational background, the number of commissary chamber meeting and profitability with environmental disclosure, and the size and profitability influence negatif and positive.*

**Keywords:** *Board of Commissioners Size, Proportion of Independent Commissioners, The Commissioner President's Educational Background, The Number of Commissary Chamber Meeting, Environmental Disclosure*

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

*Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno *et.al.*, 2006). Brown dan Deegan (1998) mengatakan *environmental disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan cara demikian, perusahaan akan memperoleh manfaat positif yakni perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Permasalahan pencemaran lingkungan masih sering terjadi di Indonesia, misalnya saja masalah PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT.IKPP) Serang Banten yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang baik dengan membuang limbah yang dihasilkan ke Sungai Ciujung yang mengakibatkan pencemaran dan berdampak pada menurunnya kualitas sungai. Sedangkan kehidupan masyarakat bergantung pada sungai tersebut (WALHI, 2011). PT. Power Steel Mandiri (PT. PSM) Tangerang yang mengoperasikan empat dari sepuluh tungku pembakaran baja yang belum mendapatkan izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tangerang yang mencemari udara dengan bahan B3 yaitu Bahan Beracun dan Berbahaya (WALHI, 2011) .

Berdasarkan kasus di atas pada kenyataannya perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah terhadap masalah tanggung jawab sosial terutama mengenai dampak lingkungan dari aktivitas industrinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapat sorotan negatif atas terbengkalainya pengelolaan lingkungan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan rendahnya minat perusahaan terhadap konversi lingkungan (Kurniawati, 2011).

Penelitian yang menguji keterkaitan antara *corporate governance* terhadap *environmental disclosure* dilakukan oleh Uwuigbe *et.al.* (2011) dengan hasil terdapat korelasi negatif dengan tingkat signifikan 0,01 antara ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan diantara perusahaan yang dipilih dan terdapat korelasi positif dengan tingkat signifikan 0,01 antara komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan. Yu Cong dan Martin Freedman (2011) dengan hasil terdapat hubungan yang positif antara *environmental disclosure* dengan *corporate governance* dan antara *environmental disclosure* dengan *corporate governance* di era-pasca SOX. Akan tetapi terdapat hubungan negatif antara *environmental performance* dengan

*corporate governance* dan antara *environmental performance* dengan *environmental disclosure*.

Penelitian di Indonesia juga sudah banyak dilakukan antara lain oleh Suhardjanto dan Miranti (2008) dengan hasil profitabilitas dan tipe industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure* akan tetapi *size*, *leverage*, cakupan operasional perusahaan, proporsi dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Permatasari (2009) dengan hasil proporsi dewan komisaris independen, latar belakang *culture* presiden komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan latar belakang pendidikan, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan tipe industri tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berpijak dari penelitian sebelumnya, dan mengembangkan model penelitian Yu Cong dan Martin Freedman (2011) maka penelitian ini mencoba untuk mengkonfirmasi kembali pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*.

## **2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Hubungan Antara Ukuran Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure***

Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*. Hasil penelitian Frendy *et.al.* (2011) dan Sun *et.al.* (2010) menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*. Lain halnya dalam penelitian Febrina *et.al.* (2011) dan Uwuigbe (2011) yang menemukan pengaruh negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>1</sub>:** Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

## **2.2. Hubungan Antara Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan *Environmental Disclosure***

Peran utama dewan komisaris adalah terkait dengan fungsi kontrol (Pound, 1995). Dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi sukarela dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Lebih jauh lagi Choiriyah (2010) dan Uwuigbe *et.al.* (2011) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Lain halnya dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni (2009), Yusnita (2010) dan Fatayaningrum (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

**H<sub>2</sub>:** Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

## **2.3. Hubungan Antara Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris dengan *Environmental Disclosure***

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi karena seorang presiden komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007).

Lebih jauh lagi Suhardjanto dan Afni (2009) dan Choiriyah (2010) mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008) yang mengatakan latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh dengan *environmental disclosure*. Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>:** Latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*

#### **2.4. Hubungan Antara Jumlah Rapat Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure***

Sesuai dengan *corporate governance guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007), menunjukkan bahwa semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan pengungkapan lingkungan.

Dari argumen tersebut di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>:** Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dewan komisaris yang direpresentasikan melalui ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel dependennya adalah *environmental disclosure*. Selain itu, *size*, *profitabilitas*, dan *leverage* digunakan dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan dalam lampiran II.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah 222 perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2011. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan manufaktur.

Alasan mengapa peneliti memilih perusahaan manufaktur adalah karena berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 b). Selain itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). Maka, peneliti berargumen bahwa perusahaan manufaktur merupakan satu diantara perusahaan yang dimaksudkan dalam UU tersebut. Tidak semua anggota populasi ini akan menjadi obyek penelitian sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel.

### 3.3. Metode Analisis Data

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, berikut model regresi tersebut:

$$EDI_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 UDKOM_{it} + \alpha_2 PRODKOM_{it} + \alpha_3 LBPPK_{it} + \alpha_4 RPTDK_{it} + \alpha_5 SIZE_{it} + \alpha_6 LEV_{it} + \alpha_7 PROF_{it} + E_{it}$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda

<b>Simbol</b>	<b>Keterangan</b>
EDI	<i>Environmental Disclosure Index</i>
$\alpha_0$	Konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5, \alpha_6$	Koefisien
UDEKOM	Ukuran Dewan Komisaris
PRODKOM	Proporsi Dewan Komisaris Independen
LBPPK	Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris
RPTDK	Jumlah Rapat Dewan Komisaris
SIZE	Ukuran Perusahaan
LEV	Leverage yang diukur dengan rumus DER
PROF	Profitabilitas yang diukur dengan rumus ROA
E	Standar error

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 4.1 merupakan hasil analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel tersebut UDKOM, PRODKOM, LBPPK, JRPTDK sebagai proksi dewan komisaris memiliki rata-rata yang cukup tinggi. *Leverage* sebagai proksi dari rasio kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas juga memiliki rata-rata relatif sedang. Tetapi untuk *size* dan profitabilitas (*prof*) memiliki rata-rata cukup tinggi dengan variasi yang sangat tinggi.

##### **1. Hasil dan Pembahasan**

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas di atas 0,5 dan variabel UDKOM, LBPPK dan JRPTDK signifikan sedangkan PRODKOM tidak signifikan. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Hasil uji autokolerasi menunjukkan bahwa nilai DW pada model regresi sebesar 1,549, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi autokolerasi, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2. Hasil uji Goodness of Fit Model menunjukkan bahwa model dinyatakan Fit sebagaimana dapat dilihat dari uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.143, selain itu hasil pengolahan

data terlihat bahwa nilai  $F = 3,450$  dengan signifikan sebesar  $0,002 < 0,05$ . Nilai signifikan pengujian yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  menunjukkan bahwa model regresi dapat dikatakan baik, sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

#### **4.1.1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap *environmental disclosure***

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris (UDKOM) terhadap tingkat *environmental disclosure* (EDI) diperoleh hasil bahwa nilai  $\beta_1$  sebesar  $-0,004$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,736$  berada lebih besar pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis pertama gagal menolak  $H_0$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Febrina *et.al.* (2011) dan Uwuigbe (2011), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi *environmental disclosure*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Frendy *et.al.* (2011) dan Sun *et.al.* (2010) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*.

Alasan mengapa ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap *environmental disclosure*. Sehingga, berapapun jumlahnya dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak satupun dewan komisaris yang memperhatikan terhadap pengelolaan lingkungan. Artinya, dari sekian banyaknya perusahaan yang ada disampel, tidak satupun dari mereka yang memfokuskan diri pada *environmental disclosure*.

#### **4.1.2. Pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure***

Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen diukur dari perbandingan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan nilai  $\beta_2$  sebesar  $0,165$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,415$  berada lebih



besar pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis kedua gagal menolak  $H_0$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni (2009), Yusnita (2010), dan Fatayaningrum (2011), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen dengan *environmental disclosure*. Dengan demikian, keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan (Hasyim dan Devi, 2007). Akan tetapi, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Choiriyah (2010) dan Uwuigbe (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

#### **4.1.3. Pengaruh latar belakang pendidikan presiden komisaris terhadap *environmental disclosure***

Pada uji parsial (*t-test*) tabel 4.4.3, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $\beta_3$  sebesar -0,030 dengan tingkat signifikan sebesar 0,564 berada lebih besar pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis ketiga gagal menolak  $H_0$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2005), Kusumastuti dkk (2007), Permatasari (2009) serta Suhardjanto dan Miranti (2008) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Namun, hasil penelitian ini menentang penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Afni (2009), dan Choiriyah (2010) yang menemukan hasil bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Alasan yang digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah dalam penelitian ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis dan ekonomi (keuangan), padahal terdapat kemungkinan latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang dapat menunjang kelangsungan bisnis perusahaan lebih diperlukan. Selain itu, adanya kebutuhan akan *soft skill* dalam menjalankan bisnis, sedangkan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah merupakan pendidikan *hard skill*. Penelitian dari *Harvard University* di Amerika Serikat mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill* (Nurudin, 2004).

#### **4.1.4. Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure***

Banyak penelitian yang meneliti mengenai hubungan pengaruh antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*. Berdasarkan hasil pengujian parsial variabel jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure*, dapat diketahui bahwa nilai  $\beta_4$  sebesar 0,009 dengan tingkat signifikan sebesar 0,071 berada lebih besar pada  $\alpha = 0,05$ , sehingga hipotesis keempat gagal menolak  $H_0$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Waryanto (2010) yang menunjukkan temuan bahwa tidak terdapat hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan CSR. Penelitian Cety dan Suhardjanto (2010) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan suatu perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian ini menentang hasil penelitian Mizrawati (2009) dan Xie *et.al.* (2003) dalam Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan, maka akrual kelolaan perusahaan menjadi semakin kecil.

Alasan yang tepat untuk menjelaskan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris kurang efektif, dikarenakan adanya dominasi suara dari anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sehingga mengesampingkan kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006 dalam Waryanto, 2010).

#### **4.1.5. Pengaruh *size* terhadap *environmental disclosure***

Ukuran perusahaan (*size*) sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* pada tingkat signifikansi sebesar 0,049 ( $0,049 < 0,05$ ). Koefisien positif signifikan berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi lingkungan dalam *annual report*. Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Disamping itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan cara untuk mengurangi biaya politis sebagai bukti tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

#### **4.1.6. Pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure***

Dalam penelitian ini, *leverage* sebagai variabel kontrol yang diproksikan dengan rasio kewajiban terhadap modal sendiri atau ekuitas. Pada uji parsial (*t-test*) Tabel 4.4.3, dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dengan nilai signifikan 0,011 (lebih kecil dari signifikansi 0,005). Hal ini berarti *leverage* perusahaan berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Dengan kata lain, semakin rendah tingkat *leverage* perusahaan, maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan akan semakin luas dan sebaliknya, semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan maka pengungkapan lingkungan yang dilakukan menjadi lebih sedikit atau rendah.

#### **4.1.7. Pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure***

Variabel kontrol yang terakhir adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki  $p$ -value sebesar 0,184 yang lebih besar daripada tingkat signifikansi 5% sehingga disimpulkan bahwa profitabilitas tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Mengingat budaya yang berkembang di Indonesia yang beranggapan bahwa praktik *corporate governance* hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya sebagai suatu sistem yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja (Mintara, 2008 dalam Yusnita, 2010), dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak menggunakan sebagian profitnya untuk memperbaiki kualitas informasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Belakoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif (*competitive disadvantage*) karena perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan informasi tersebut.

## **5. PENUTUP**

### **5.1. Simpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak dapat dibuktikan berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di atas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan *environmental disclosure*, karena dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap *environmental disclosure*. Sehingga, tidak satupun dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan. Artinya, dari sekian banyaknya perusahaan yang ada disampel, tidak satupun dari mereka yang memfokuskan diri pada *environmental disclosure*. Di dalam teori agensi, keberadaan dewan komisaris bukan untuk

mengawasi kinerja sosial tetapi kinerja finansial. Berdasarkan kerangka teori *stakeholder* keberadaan dari kinerja lingkungan dan pengungkapan lingkungan itu cenderung lebih ditentukan oleh pihak-pihak *stakeholder* dari luar perusahaan bukan dari pihak internal perusahaan. Bukti dari penelitian Gray *et.al.* (1995) dan Deegan (2002) bahwa pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) mempengaruhi praktik *environmental disclosure*. Sehingga teori agensi gagal untuk menerangkan hal ini, karena sebuah keputusan dewan komisaris sesuai dengan tugas awal dari pembentukan dewan komisaris berfokus pada bidang operasional ataupun finansial bukan pada bidang kinerja lingkungan.

## **5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang**

Topik *environmental disclosure* yang masih jarang diteliti, menyebabkan peneliti merasa kesulitan dalam mengumpulkan referensi dan kajian teori yang mendalam, serta kerangka kerja teori yang belum kuat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan teori yang digunakan dan menganalisis hasil penelitian. Selain itu, perusahaan tersebut masih belum menerapkan indeks yang sesuai dengan kriteria penelitian dalam pengungkapan *environmental disclosure*, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam menginterpretasikan laporan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan dan masih jarang nya perusahaan yang mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam *annual report*, walaupun pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2007, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam menentukan sampel yang akan diteliti.

Penelitian ini gagal memberikan dasar yang kuat bagi teori agensi sebagai dasar analisis yang menjelaskan *environmental disclosure*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjelasan mengenai pengungkapan kinerja lingkungan cenderung diterangkan oleh teori yang lain. Sehingga, analisis yang mengangkat dewan komisaris sebagai variabel penjelas atas *environmental disclosure* seharusnya menyertakan variabel lain yang mampu

menjembatani antara kerangka kerja teori agensi dengan kerangka kerja teori yang menjelaskan teori secara langsung.

## Daftar Pustaka

- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2 No.1 pp.36- 51.
- Brown, Noel dan Deegan, C. 1998. "The Public Disclosure of Environmental Performance Information (A dual Test of Media Agenda Setting Theory and Legitimacy Theory)". *Accounting and Business Research*. Vol. 29 No.1 pp 21-41.
- Cheng, *et.al.* 2006. "Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure". *International Journal of Accounting*. Vol.41 pp.262-289.
- Choiriyah, Umi. 2010. "Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia". Skripsi Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses tanggal 16 Februari 2012.
- Cong, Yu and Freedman, M. 2011. "Corporate Governance and Environmental Performance and Disclosure". *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting Journal*. Vol.27 pp 223-232.
- Corporate Governance Guidelines. 2007. Guidelines on Corporate Governance. Diakses tanggal 05 Maret 2012.
- Deegan, Craig dan Rankin. 1996. "Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosure by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.9 no.2 pp. 50-67.
- Deegan, Craig. 2004. "Environmental Disclosure and Share Price- A Discussion about Efforts to Study This Relationship". *Accounting Forum*. Vol.28 pp.122-136.
- Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI). 2002. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). Diakses tanggal 06 Maret 2012.
- Freedman, M. dan Jaggi, B. 2005. "Global Warming, Commitment to the Kyoto Protocol, and Accounting Disclosures by The Largest Global Public Firms From Polluting Industries". *The International Journal of Accounting*. Vol. 40 pp.215- 232.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

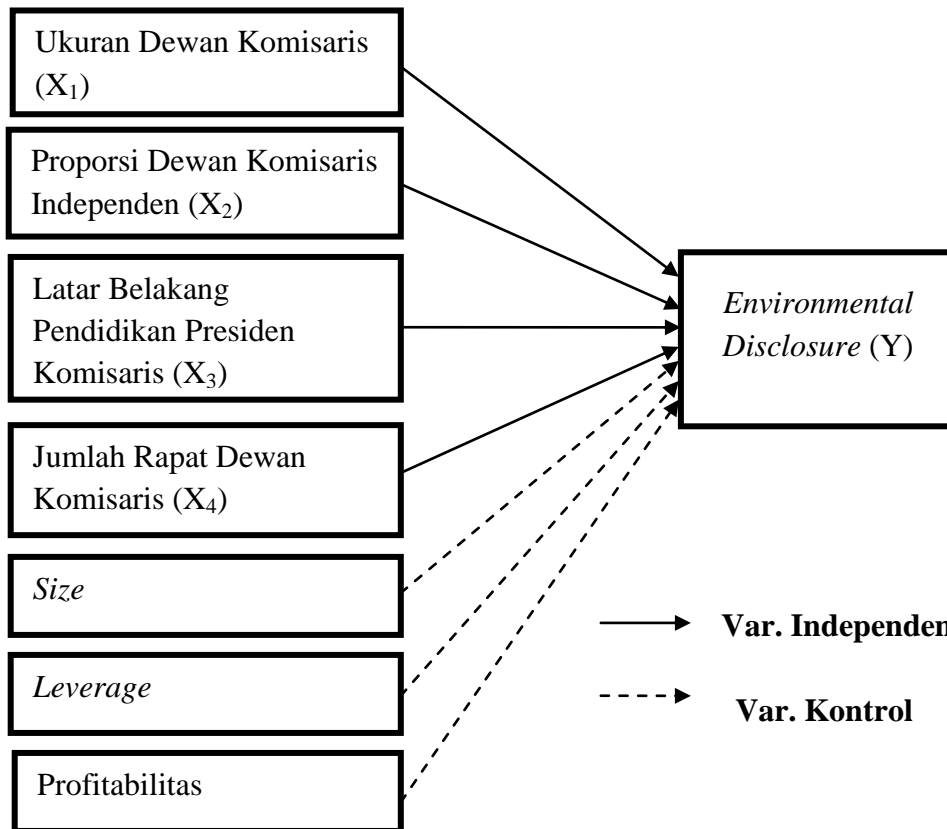
- Gray *et.al.* 1995. "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8 No.2 pp.47-77.
- Hackston dan Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 1 pp.77-108.
- Haniffa dan Cooke. 2005. "The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting". *Journal of Accounting and Public Policy*, pp.391-430.
- Jensen *et.al.* 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol.3 pp 305-360.
- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 2009. "Laporan Penilaian PROPER 2008- 2009". [http:// www.menlh.go.id/](http://www.menlh.go.id/) diakses tanggal 27 Maret 2012.
- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 2010. "Laporan Penilaian PROPER 2010". [http:// www.menlh.go.id/](http://www.menlh.go.id/) diakses tanggal 27 Maret 2012.
- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 2011. "Laporan Penilaian PROPER 2011". [http:// www.menlh.go.id/](http://www.menlh.go.id/) diakses tanggal 27 Maret 2012.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta. Diakses tanggal 7 Maret 2012.
- Kusumastuti, Supatmi dan Satra. 2007. "Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif CG". *Journal Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Petra Surabaya*. <http://www.petra.ac.id/>. diakses tanggal 29 Februari 2012.
- O'Donovan, Garry. 2002. "Environmental Disclosure in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.15 No.3 pp. 344-371.
- Pattern, D. 1992. "Intra- Industry Environmental Disclosure in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory". *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 17 No.5 pp 471-475.
- Permatasari, Novita Dian. 2009. "Pengaruh *Corporate Governance*, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap *Environmental Disclosure*" (Studi Empiris Pada Perusahaan *Listing* di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Diakses tanggal 27 Mei 2009.
- Richardson, Vernon. J. 1989. "Information Asymmetry An Earning Management: Some Evidence". Working Paper, 30 Maret. Diakses tanggal 7 Februari 2012.
- Rosenstein, S., dan Wyatt. J.G. 1990. "Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth". *Journal of Financial Economic*. Vol.26 pp.175-191.

- Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko dan Afni, Aulia. 2009. "Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Akuntansi*. No. 03 Tahun XIII pp.243-364 ISSN 1410-3591.
- Suhardjanto, Djoko dan Miranti, Laras. 2008. "Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan". Makalah Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses tanggal 12 Maret 2012.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., and Habbash, M. 2010. "Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance, and Earnings management". *Managerial Auditing Journal*. Vol.25 No.27 pp 679-700.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Diakses tanggal 09 Maret 2012.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses tanggal 09 Maret 2012.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diakses tanggal 09 Maret 2012.
- Uwuigbe *et.al.* 2011. "The Effect of Board Size and Board Composition on Firms Corporate Environmental Disclosure: A Study of Selected Firms in Nigeria". *Acta Universitatis Danubius*. Vol.7 No.5 pp.164-176.
- WALHI. 2011. "Selamatkan dan Pulihkan Sungai Ciujung dari Pencemaran Limbah PT. Indah Kiat *Pulp and Paper*". <http://www.walhi.or.id/> diakses tanggal 12 Maret 2012.
- WALHI. 2011. "KLH Ukur Pencemaran di Peleburan Baja". <http://www.walhi.or.id/> diakses tanggal 12 Maret 2012.
- Waryanto. 2010. "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia". Skripsi Akuntansi *Universitas Diponegoro*. Diakses tanggal 02 Februari 2012.
- [www.csrindonesia.com](http://www.csrindonesia.com) diakses tanggal 9 Maret 2012.
- [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org) diakses tanggal 24 Februari 2012.
- [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diakses tanggal 05 April 2012
- Yusnita, Theodora. 2010. "Corporate Governance, Environmental Performance dan Environmental Disclosure di Indonesia". Skripsi Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses tanggal 20 Februari 2012.



**Lampiran**

**Lampiran I  
Kerangka Pemikiran**



**Sumber: Diadopsi dari penelitian Yu Cong dan Martin Freedman (2011), Uwuigbe et.al. (2011), Suhardjanto dan Miranti (2008).**

**Lampiran II  
Definisi Operasional dan Pengukuran**

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Ukuran Dewan Komisaris (X <sub>1</sub> )	Ukuran dewan komisaris dalam melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, et.al, 2009)	Jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu laporan tahunan perusahaan (Waryanto, 2010)	Rasio
Proporsi Dewan Komisaris Independen (X <sub>2</sub> )	Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Herwidayatmo, 2000)	$\frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$ (Haniffa dan Cokke, 2005).	Rasio

Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris (X <sub>3</sub> )	Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris yang berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed dan Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009 ).	Kode 1 untuk latar belakang pendidikan keuangan atau bisnis; Kode 0 untuk latar belakang pendidikan lain. (Haniffa dan Cooke, 2005)	Nominal
Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X <sub>4</sub> )	Rapat yang dilakukan antara dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Yusnita, 2010)	Jumlah rapat dalam satu tahun. (Brick dan Chidambaran, 2007)	Rasio
<i>Environmental Disclosure</i> (Y)	Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. (Fatayaningrum, 2011).	Skor pengungkapan lingkungan pada <i>annual report</i> dengan indeks GRI (Cooke, 1989)	Rasio
<i>Size</i>	Ukuran perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. (Waryanto, 2010).	<i>log</i> (nilai buku total asset) (Haniffa dan Cooke, 2005)	Rasio
<i>Leverage</i>	Proporsi total kewajiban terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. (Sembiring, 2005).	$\frac{\sum \text{Kewajiban}}{\sum \text{Ekuitas}}$ (Freedman dan Jaggi, 2005)	Rasio
Profitabilitas	Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. (Belkaoui dan Karpik, 1989).	$\frac{\sum \text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\sum \text{Asset}}$ (Haniffa dan Cooke, 2005)	Rasio

**Lampiran III**  
**Daftar Perusahaan Manufaktur Yang Menjadi Sampel**

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	<b>ADMG</b>	PT Polychem Indonesia Tbk
2	<b>ASII</b>	PT Astra International Tbk
3	<b>AUTO</b>	PT Astra Otoparts Tbk
4	<b>BRAM</b>	PT Indo Kordsa Tbk
5	<b>BRNA</b>	PT Berlina Tbk
6	<b>BUDI</b>	PT Budi Acid Jaya Tbk
7	<b>ESTI</b>	PT Ever Shine Textile Industry Tbk
8	<b>ETWA</b>	PT Eterindo Wahanatama Tbk
9	<b>FASW</b>	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
10	<b>GJTL</b>	PT Gajah Tunggal Tbk

11	<b>HMSP</b>	PT HM Sampoerna Tbk
12	<b>INAF</b>	PT Indofarma (Persero) Tbk
13	<b>INCI</b>	PT Intanwijaya Internasional Tbk
14	<b>INTP</b>	PT Indocement Tunggul Prakasa Tbk
15	<b>ISAT</b>	PT IndosatTbk
16	<b>JPRS</b>	PT Jaya Pari Steel Tbk
17	<b>KAEF</b>	PT Kimia Farma (Persero) Tbk
18	<b>KBLM</b>	PT Kabelindo Murni Tbk
19	<b>PRAS</b>	PT Prima Alloy Steel Tbk
20	<b>SCCO</b>	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
21	<b>SMCB</b>	PT Holcim Indonesia Tbk
22	<b>SMGR</b>	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
23	<b>TCID</b>	PT Mandom Indonesia Tbk
24	<b>TLKM</b>	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
25	<b>ULTJ</b>	PT Ultra Jaya Milk Tbk
26	<b>UNTR</b>	PT United Tractor Tbk

Sumber: Pusat Referensi Pasar Modal BEI (2012)

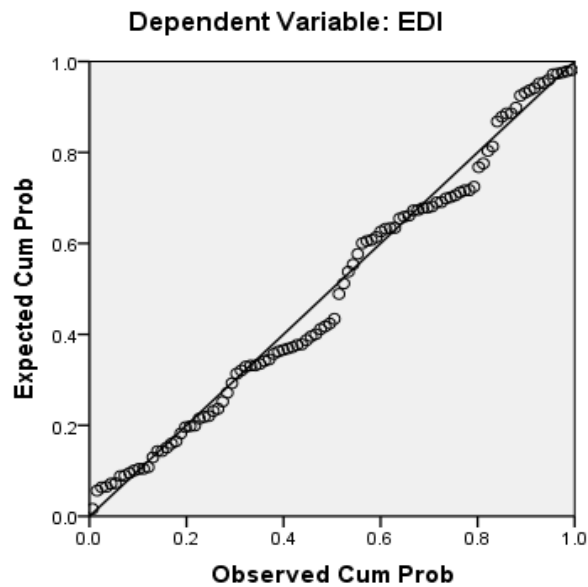
**Lampiran IV**  
**Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
UDKOM	104	2	11	5.25	2.272
PRODKOM	104	.20	.75	.4177	.10783
LBPPK	104	0	1	.30	.460
JRPTDK	104	2	27	6.62	4.668
SIZE	104	2.10	5.81	3.6125	.87813
LEV	104	.04	4.36	1.0816	.86124
PROF	104	-123.79	147.82	8.5108	20.61622
EDI	104	.07	1.00	.4212	.22812
Valid N (listwise)	104				

Sumber: Data sekunder yang diolah (2011)

**Lampiran V**  
**Hasil Uji Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Lampiran VI**  
**Hasil Uji Kolmogorov Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		104
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.20391060
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.048
Kolmogorov-Smirnov Z		.804
Asymp. Sig. (2-tailed)		.538

a. Test distribution is Normal.

**Lampiran VII**  
**Hasil Uji Multikolenieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.152	.137		1.105	.272		
UDKOM	-.004	.012	-.041	-.338	.736	.561	1.783
PRODKOM	.165	.201	.078	.819	.415	.923	1.083
LBPPK	-.030	.052	-.060	-.579	.564	.769	1.301
JRPTDK	.009	.005	.177	1.826	.071	.889	1.125
SIZE	.064	.032	.247	1.996	.049	.543	1.840
LEV	-.064	.025	-.243	2.578	.011	.935	1.069
PROF	.001	.001	.128	1.338	.184	.910	1.099

a. Dependent Variable: EDI

**Lampiran VIII**  
**Hasil Uji Heterokedstisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.652	.374		-4.414	.000
UDKOM	.012	.033	.043	.345	.731
PRODKOM	.782	.548	.140	1.427	.157
LBPPK	-.081	.141	-.062	-.572	.569
JRPTDK	.018	.013	.140	1.395	.166
SIZE	.073	.088	.106	.829	.409
LEV	-.134	.068	-.191	-1.962	.053
PROF	.003	.003	.114	1.155	.251

a. Dependent Variable: LNEDI

**Lampiran IX**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 <sup>a</sup>	.201	.143	.21121	1.549

a. Predictors: (Constant), PROF , LBPPK , LEV , UDKOM , PRODKOM , JRPTDK , SIZE

b. Dependent Variable: EDI

**Lampiran X**  
**Hasil Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.077	7	.154	3.450	.002 <sup>b</sup>
	Residual	4.283	96	.045		
	Total	5.360	103			

a. Dependent Variable: EDI

b. Predictors: (Constant), PROF , LBPPK , LEV , UDKOM , PRODKOM , JRPTDK , SIZE

**Lampiran XI**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.448 <sup>a</sup>	.201	.143	.21121	1.549

a. Predictors: (Constant), PROF , LBPPK , LEV , UDKOM , PRODKOM , JRPTDK , SIZE

b. Dependent Variable: EDI

**Lampiran XII**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**

**Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris dan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure***

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.152	.137		1.105	.272
UDKOM	-.004	.012	-.041	-.338	.736
PRODKO	.165	.201	.078	.819	.415
M					
LBPPK	-.030	.052	-.060	-.579	.564
JRPTDK	.009	.005	.177	1.826	.071
SIZE (X5)	.064	.032	.247	1.996	.049
LEV (X6)	-.064	.025	-.243	-2.578	.011
PROF (X7)	.001	.001	.128	1.338	.184

a. Dependent Variable: EDI (Y)

**Lampiran XIII**  
**Daftar Indikator *Environmental Disclosure* Menurut GRI**

INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN
Bahan Baku
<b>EN 1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.</b>
<b>EN 2 Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.</b>
Energi
<b>EN 3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun tidak langsung</b>
<b>EN 4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung.</b>
<b>EN 5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.</b>
<b>EN 6 Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini.</b>
<b>EN 7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.</b>
Air
<b>EN 8 Total pemakaian air dari sumbernya.</b>

<b>EN 9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.</b>
<b>EN 10 Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.</b>
Keanekaragaman Hayati
<b>EN 11 Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi.</b>
<b>EN 12 Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi.</b>
<b>EN 13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.</b>
<b>EN 14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.</b>
<b>EN 15 Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan risiko kepunahan.</b>
Emisi, Effluent, dan Limbah
<b>EN 16 Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.</b>
<b>EN 17 Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.</b>
<b>EN 18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.</b>
<b>EN 19 Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.</b>
<b>EN 20 NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.</b>
<b>EN 21 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.</b>
<b>EN 22 Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.</b>
<b>EN 23 Total biaya dan jumlah yang tumpah.</b>
<b>EN 24 Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang</b>
<b>EN 25 Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan.</b>
Produk dan Jasa
<b>EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif ini.</b>
<b>EN 27 Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.</b>
Kepatuhan
<b>EN 28 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.</b>
Transportasi
<b>EN 29 Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.</b>
Keseluruhan
<b>EN 30 Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.</b>



## SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.  
Redaksi Jurnal Riset Akuntansi Indonesia  
Di Tempat

Bersama ini kami kirimkan naskah

Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Environmental Disclosure* Pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing* di BEI Tahun 2008-2011

Penulis : 1. Bahtiar Effendi

2. Hj. Lia Uzliawati, SE., M.si

3. Agus Sholikhhan Yulianto, SE., Ak., M.si

Instansi : 1. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Serang

2. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Serang

3. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa – Serang

Untuk dapat diterbitkan pada Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Kami menyatakan bahwa naskah tersebut belum pernah diterbitkan, dan selama naskah ini masih dalam proses penelaahan dan penyuntingan tidak akan diajukan untuk diterbitkan di media manapun, kecuali kami telah mencabut secara resmi naskah tersebut dari Jurnal Riset Akuntansi Indonesia.

Mohon agar korespondensi (*corresponding author*) ditujukan kepada :

Nama : Bahtiar Effendi

Alamat : Link. Kubang Welingi No.16, Rt. 07/03 Ds/ Kec.  
Purwakarta , Cilegon - Banten 42437

HP : 0819 1115 1879

Email : even\_decaprio90@yahoo.com

Demikian surat pernyataan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Serang, 25 Juni 2012

Hormat kami,

(Bahtiar Effendi)